

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng pasifik⁽¹⁾. Keberadaan lempeng-lempeng ini menghasilkan aktivitas tektonik berupa desakan magma ke permukaan. Hal ini mengakibatkan terbentuknya deretan gunung api (*volcanic arc*) yang merupakan bagian dari deretan gunung api Asia-Pasifik *Ring of Fire* (lingkaran api) atau deret sirkum pasifik^(1,2). Keberadaan *ring of fire* memberikan kontribusi 90% dari kejadian gempabumi dengan hampir semua gempa yang dihasilkan adalah gempa besar⁽¹⁾.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk ke dalam zona *ring of fire*. Provinsi ini juga terletak pada tumbukan dua lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia⁽³⁾. Berdasarkan hasil pengkajian ancaman bahaya BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, Sumatera Barat memiliki probabilitas tinggi mengalami gempa dan tsunami⁽³⁾. Hasil pengkajian ini sejalan dengan pengkajian resiko bencana oleh BNPB tahun 2016 dan tahun 2018. Hasil pengkajian pada kedua tahun yang berbeda menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam lima provinsi di Indonesia dengan jumlah paparan resiko tinggi untuk bencana gempabumi maupun tsunami ditandai dengan nilai IRB yang tinggi (151,56)^(1,4). Sejalan dengan itu, pengkajian IRB oleh BNPB tahun 2018 menunjukkan Kota Padang termasuk ke dalam kota dengan resiko tinggi terhadap bencana alam dengan nilai IRB 191,60⁽³⁾. Hasil ini didukung oleh faktor geografis Kota Padang yang memiliki bentuk dataran landai pada daerah pesisir pantai⁽⁵⁾. Selain itu, dari segi demografis masih terdapat penduduk Kota Padang yang bermukim

kurang dari 500 meter dari bibir pantai⁽⁴⁾ dan tata ruang kota dengan letak pusat perindustrian umumnya berada di daerah dekat dengan pesisir pantai⁽⁶⁾.

Sepanjang tahun 2018, Sumatera Barat mengalami 91 kejadian bencana alam yang terdiri dari 80% (73 kejadian) bencana hidrometeorologi dan 20% (18 kejadian) bencana geologi⁽⁷⁾. Meskipun secara keseluruhan kejadian bencana geologi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan bencana hidrometeorologi, tetapi bencana geologi memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik dari segi ekonomi maupun korban jiwa⁽¹⁾. Seperti dua kejadian tsunami dan satu kejadian gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018. Kejadian ini mengakibatkan kematian pada hampir setengah dari wilayah terdampak⁽⁸⁾. Hal ini menyebabkan pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara dengan total kematian akibat bencana alam terbanyak⁽⁹⁾.

Selain berdampak pada korban jiwa, kejadian gempa dan tsunami juga memberikan dampak pada beberapa sektor kehidupan. Di bidang kesehatan, bencana geologis mengakibatkan peningkatan hingga 0,24% malnutrisi pada anak-anak dibawah lima tahun, sedangkan di bidang pendidikan berdampak pada penurunan kurang lebih 0,2% tingkat pendidikan⁽¹⁰⁾. Kedua sektor ini secara tidak langsung turut berdampak pada sektor ekonomi dengan secara bertahap menghambat penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi⁽⁸⁾. Berkaitan dengan itu, total dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sebanding dengan total nilai kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Seperti pada Gempa Sumatera Barat 30 September tahun 2009, total kerusakan dan kerugian mencapai Rp20,86 triliun, tetapi pendanaan pemulihan pascabencana hanya sebesar Rp6,417 triliun⁽¹¹⁾.

Oleh karena tingginya resiko bencana di wilayah Sumatera Barat dan luasnya dampak yang diakibatkan oleh bencana alam, maka sangat penting untuk menerapkan

Pengurangan Resiko Bencana (PRB) atau *Disaster Risk Reduction*. Salah satu prioritas utama PRB dalam kerangka kerja Sendai, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang lebih efektif dan untuk membangun berkesinambungan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi⁽¹²⁾. Peningkatan kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan PRB. Kesiapsiagaan memiliki tujuan memastikan keberadaan sumber daya yang diperlukan untuk merespon bencana secara efektif tersedia di komunitas dan masyarakat tahu bagaimana cara menggunakan sumber daya tersebut jika bencana terjadi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dinilai sebagai jembatan penghubung antara prabencana dan pascabencana^(13, 14). Selain itu gambaran dari kejadian tsunami Palu dan Donggala di tahun 2018, tidak berjalannya sistem peringatan dini secara efektif dan kurangnya pengalaman warga sekitar menyebabkan banyaknya korban jiwa akibat tsunami⁽¹⁵⁾. Maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya meminimalisir korban jiwa akibat bencana.

Dalam mencapai prioritas PRB, kerangka kerja Sendai memfokuskan pada pemberdayaan komunitas lokal sebagai kunci utama⁽¹⁶⁾. Prinsip ini didukung oleh aturan 72 jam atau *72 Hour Rules* dimana individu harus sanggup bertindak mandiri setidaknya selama tiga hari setelah bencana. Hal ini dilakukan karena kemungkinan adanya hambatan bagi pemerintah atau organisasi kebencanaan untuk mencapai daerah terdampak bencana⁽¹⁷⁾. Untuk itu, pengukuran kesiapsiagaan harus dapat memastikan individu mampu merespon bencana secara cepat dan tepat.

Menurut Dynes (2002) ketika bencana terjadi umumnya modal yang terdapat di komunitas mengalami kerusakan seperti modal fisik (bangunan), modal manusia (korban jiwa), maupun modal ekonomi. Akan tetapi, hanya modal sosial satu-satunya bentuk modal yang mengalami sedikit kerusakan bahkan mengalami pembaharuan

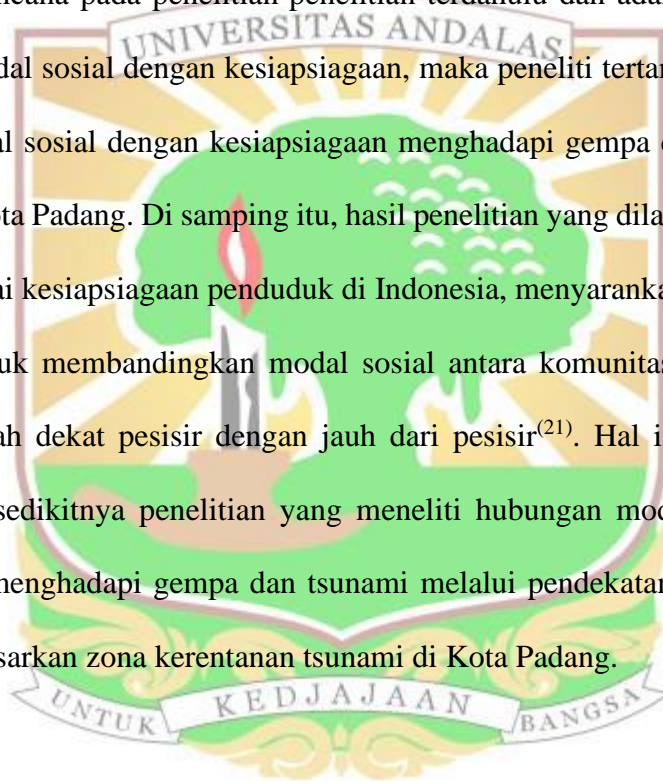
selama periode darurat⁽¹⁸⁾. Keberadaan modal sosial di komunitas mempermudah anggota komunitas dalam memperoleh informasi sebab informasi merupakan bagian tetap yang tertanam dalam relasi sosial⁽¹⁹⁾. Terlebih dalam konteks kebencanaan, keberadaan modal sosial yang tinggi cenderung meningkatkan kesiapsiagaan individu dalam menghadapi bencana^(14, 16, 17, 20-25).

Penelitian Witrovapong et al (2015) memperoleh bahwa individu yang lebih aktif berpartisipasi di lingkungannya cenderung memiliki perilaku PRB, seperti mengikuti berita terkait bencana, mempunyai *emergency kit/emergency plan*, dan memiliki keinginan untuk migrasi. Hal ini karena partisipasi sosial memperluas hubungan sosial aktor sehingga mampu memfasilitasi dalam pertukaran informasi dan mendorong individu untuk lebih bersiap siaga melalui *peer pressure* rekan satu kelompok⁽²⁴⁾. Keberadaan modal sosial juga dapat memberikan dukungan secara finansial, emosional, maupun spiritual pada kelompok rentan sehingga membantu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana⁽²³⁾. Penelitian Reininger et al (2013) mendapatkan bahwa kepercayaan mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Individu yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap lingkungannya cenderung lebih mempersiapkan diri terhadap bencana supaya kelak dia dapat dipercaya oleh orang lain untuk saling berbagi kebutuhan pada tahap pascabencana⁽²²⁾. Selain itu Aldrich (2010) mengkaji bahwa pada komunitas yang memiliki dukungan finansial tinggi, tetapi dengan modal sosial rendah akan lebih lambat untuk pulih dari bencana. Sebaliknya, komunitas yang tidak memiliki dukungan finansial, tetapi modal sosial memiliki tinggi akan lebih cepat untuk pulih dari bencana⁽²⁶⁾.

Meskipun secara umum beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang signifikan antara modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, namun penelitian yang dilakukan oleh Sanyal dan Routray (2016) menemukan bahwa tidak

selalu modal sosial memberikan dampak yang positif pada komunitas terkait kesiapsiagaan bencana⁽¹⁶⁾. Modal sosial justru memberikan dampak yang negatif pada anggota kelompok yang tidak memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya perbedaan afiliasi politik. Hal ini menyebabkan kelompok yang bertentangan dengan kelompok mayoritas memperoleh sedikit akses informasi kebencanaan jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas.

Oleh karena cukup signifikannya hubungan modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada penelitian-penelitian terdahulu dan adanya keberagaman hasil antara modal sosial dengan kesiapsiagaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk di Kota Padang. Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan Dokhi et al (2017) mengenai kesiapsiagaan penduduk di Indonesia, menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk membandingkan modal sosial antara komunitas yang bertempat tinggal di daerah dekat pesisir dengan jauh dari pesisir⁽²¹⁾. Hal ini didukung pula dengan masih sedikitnya penelitian yang meneliti hubungan modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami melalui pendekatan kuantitatif yang membagi berdasarkan zona kerentanan tsunami di Kota Padang.



1.2 Perumusan Masalah

BNBP menetapkan Kota Padang sebagai salah satu wilayah rawan gempa dan tsunami^(1,4). Oleh karena letak geografis Kota Padang yang masuk ke dalam zona *ring of fire* dan didukung oleh faktor demografis penduduk yang masih bermukim di wilayah dengan zona amplifikasi gempa tinggi, maka tingkat kerentanan penduduk terdampak gempa dan tsunami meningkat. Modal sosial sebagai salah satu ilmu yang mempelajari nilai dari interaksi antara sesama manusia menunjukkan peranan yang sangat penting dalam dunia kesehatan⁽²⁷⁾, termasuk salah satunya pada bidang

kebencanaan. Beberapa penelitian menyebutkan adanya modal sosial yang tinggi di suatu komunitas berhubungan dengan peningkatan kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi bencana. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk di Kota Padang?

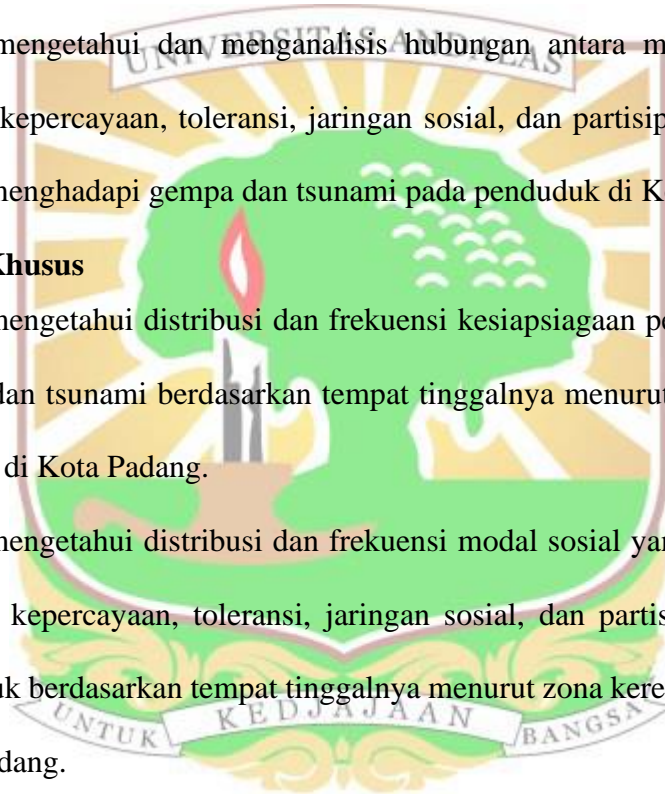
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara modal sosial yang diukur melalui kepercayaan, toleransi, jaringan sosial, dan partisipasi sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk di Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi dan frekuensi kesiapsiagaan penduduk terhadap gempa dan tsunami berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui distribusi dan frekuensi modal sosial yang diukur melalui variable kepercayaan, toleransi, jaringan sosial, dan partisipasi sosial pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui hubungan kepercayaan dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui hubungan toleransi dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.



5. Untuk mengetahui hubungan jaringan sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui hubungan partisipasi sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.
7. Untuk mengetahui komponen dari modal sosial yang paling dominan berhubungan dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk di Kota Padang.
8. Untuk menganalisis perbedaan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menurut zona kerentanan tsunami di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan fokus mempersiapkan kesiapsiagaan individu dalam menghadapi gempa dan tsunami.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu berupa pemikiran atau konsep-konsep terkait penelitian kebencanaan. Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah literatur Fakultas Kesehatan Masyarakat mengenai hubungan modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami pada penduduk di Kota Padang.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi instansi penanggulangan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat mengenai hubungan modal sosial dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami. Informasi yang didapat, diharapkan nantinya dapat berguna dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan ketahanan komunitas dalam menghadapi gempa dan tsunami terutama dengan fokus pemanfaatan modal sosial.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian di Kota Padang dengan cara membagi kecamatan-kecamatan di Kota Padang berdasarkan zona kerentanan tsunami. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kesiapsiagaan penduduk terhadap gempa dan tsunami, sedangkan variabel independennya adalah modal sosial yang diukur melalui variable kepercayaan, toleransi, jaringan sosial, dan partisipasi sosial. Penelitian menggunakan desain *cross sectional comparative*. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mengetahui hubungan kepercayaan, toleransi, jaringan sosial, dan partisipasi sosial terhadap kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami. Data sekunder berupa data jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Padang yang diperoleh melalui *website* Kemendagri.

